

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Septiani. 2008. Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 3 No.2 Desember 2008 ISSN 1858-3687 hal 47-55
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Amriani. 2014, “Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” www.bppk.kemenkeu.go.id. 16 Mei 2014
- Asshiddiqie, J. 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*.
- Aziz, H. 2015, “BPK katakan tata kelola keuangan daerah masih bermasalah” www.antaranews.com, 4 Mei 2015
- Aziz, H. 2015, “BPK: Ribuan Laporan Keuangan Pemerintah Bermasalah” www.republika.co.id, 5 Oktober 2015
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2011. Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi. [www. bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 30 Juni 2011
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2014
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments_/2009/07/270609-aidinil-zetra.pdf. www.bpk.go.id. Diakses 24 September 2015
- Bryson, J. 2001. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Edisi Bahasa Indonesia. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi Edisi Ketiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Griffin, Ricky. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Governmental Accounting Standards Board. Statement No. 34. Basic Financial Statements and Management's Discussion and Analysis for State and Local Governments*
- Halim. 2014, "Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua" *www.bppk.kemenkeu.go.id*. 16 Mei 2014
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo., 2008, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)", *Symposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Ismiyati dan Widiyanto. 2013. "Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah di Jawa Tengah" *www.bppk.go.id*. Di akses tanggal 10 November 2015
- Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2008. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara*
- Kumolo, C. 2014, "LPJ Pemda Hampir Semuanya Bermasalah" *daerah.sindonews.com*, 14 November 2014
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nurillah, A. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)*. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang
- Pramurdiata, R. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal*. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Priyono, N., 2012. *Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Periode Sebelum Reformasi Sampai dengan Pasca Reformasi*. Vol. 37 No. 1, h.81-90
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008. *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005. tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2010. tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2006. tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2005. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 71 Tahun 2010. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan..
- Rosalin, F. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)". Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sadeli, M. 2002. Dasar-dasar Akuntansi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business: A Skill-Building Approach. Third Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Soesilo, 2000. Reformasi Pembangunan dengan Langkah-Langkah Manajemen Strategik. UI, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutarman, 2009. Pengantar Teknologi Informasi. Penerbit Bumi Aksara : Jakarta.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perakayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. (BPFE, Yogyakarta).
- Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Warisno. 2008. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wisnu. 2015. "Pilkada dan Akuntabilitas" *Keuangan.co* 27 Oktober 2015